

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

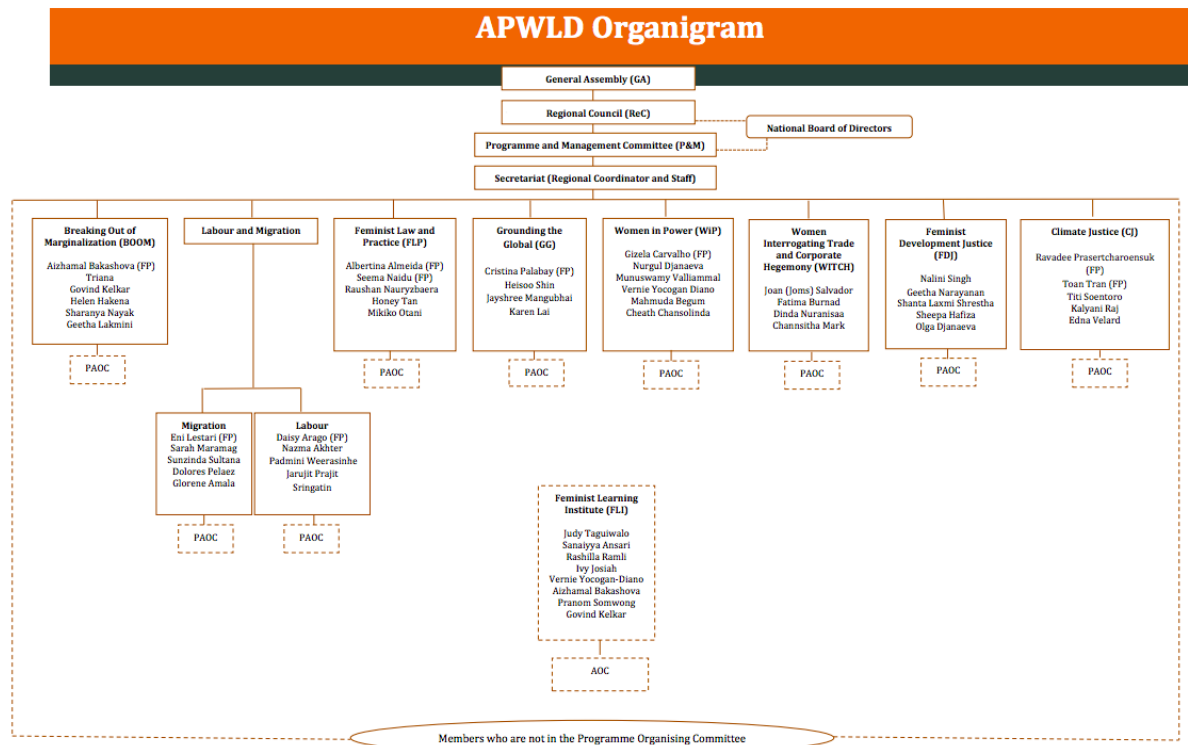
Kesetaraan gender dan hak asasi perempuan telah menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan global, termasuk dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dan kerangka HAM. Banyak instrumen internasional, termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), telah disetujui, tetapi praktik diskriminasi dan ketidaksetaraan masih ada di banyak negara, termasuk di Asia-Pasifik. Dengan demikian, jaringan advokasi lintas negara manusia seperti *Transnational Advocacy Network* (TAN) memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik dengan mendukung, menyokong, dan menekan aktor negara. Jaringan ini berusaha mengatasi hambatan gerakan yang terjadi di dalam negeri dengan mobilisasi informasi, kolaborasi politik, dan menekan aktor negara dan lembaga internasional. Konsep TAN yang diperkenalkan oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink (2014) menjelaskan bagaimana jaringan aktor non-negara bekerja sama untuk memengaruhi proses kebijakan internasional dan domestik melalui pertukaran informasi, simbol, dukungan moral, dan sumber daya.

Keck dan Sikkink menekankan bahwa TAN berfungsi melalui empat taktik utama: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* untuk mengejar perubahan sosial dan kebijakan tertentu (Keck & Sikkink, 2014). Konsep jaringan advokasi transnasional kemudian bercabang menjadi sebuah

konsep lanjutan berfokus pada feminisme, yaitu *transnational feminist network*. Dalam penelitiannya yang dituliskan oleh Kelly-Thompson et al. berjudul “*Dimensions of Transnational Feminism: Autonomous Organizing, Multilateralism, and Agenda-Setting in Global Civil Society*”, jaringan feminis transnasional menunjukkan bahwa mobilisasi lintas negara memiliki potensi untuk memperluas basis advokasi feminis dengan memasukkan perspektif lokal ke dalam norma internasional, menempatkan aktor negara dan institusi supranasional di bawah tekanan politik yang lebih besar (Kelly-Thompson, Lusvardi, Forester, & Weldon, 2024). Kelly-Thompson et al. juga menyebutkan bahwa jaringan ini memungkinkan aktivis feminis dari berbagai negara untuk bersatu untuk menyelesaikan isu-isu yang serupa seperti ketidaksetaraan gender, kekerasan berbasis gender, dan hak reproduksi (Kelly-Thompson, Lusvardi, Forester, & Weldon, 2024).

Hingga saat ini, advokasi kesetaraan gender masih dilakukan dalam rangka mempromosikan hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit juga advokasi-advokasi tersebut dilakukan dalam skala besar melalui organisasi-organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Dalam konteks Asia Pasifik, terdapat sebuah aktor jaringan advokasi feminis yang signifikan, yaitu Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, atau APWLD. APWLD beroperasi sebagai sebuah jaringan feminis yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi perempuan dan menangani isu-isu yang timbul diakibatkan dari hegemoni patriarki (Retyaningtyas, 2018). Tujuan dari APWLD adalah memberdayakan

perempuan yang kurang beruntung di wilayah tersebut, khususnya perempuan miskin di pedesaan, perempuan asli, perempuan migran, dan perempuan perkotaan (Chakma, 2016).



Gambar 1.0.1 Bagan Struktur Kepemimpinan APWLD Periode 2018-2021

Sumber: (Asian Pacific Forum on Women, Law Development, 2018)

Pada periode 2021–2024, struktur organisasi APWLD tetap menggunakan sistem kepemimpinan berbasis keanggotaan. Sistem ini terdiri dari *General Assembly*, *Regional Council*, *Programme and Management Committee (P&M)*, serta *Secretariat*. *General Assembly (GA)* adalah badan tertinggi organisasi yang terdiri dari seluruh anggota APWLD di kawasan Asia dan Pasifik. Setiap tiga tahun sekali, forum ini

memilih anggota *Regional Council* dan bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan strategis organisasi. APWLD dipimpin oleh *Regional Council* (ReC), yang terdiri dari aktivis perempuan, feminis, akademisi, dan pengacara HAM dari berbagai sub-regional Asia Pasifik. Beberapa tokoh penting yang tergabung dalam ReC dan P&M pada tahun 2021–2024 termasuk:

- Nimalka Fernando (Sri Lanka) selaku Chairperson
- Shamima Akter (Bangladesh) selaku Vice Chairperson
- Emylin L. Dena Peña (Filipina) selaku Treasurer
- Lee Na Young (Korea Selatan)
- Khuất Thu Hồng (Vietnam)
- Indira Jaising (India)
- Marina Mahathir (Malaysia)
- Maha Abu-Dayyeh Shamas (Palestina)

Mereka bertanggung jawab untuk menentukan garis besar advokasi APWLD mengenai masalah seperti keadilan pembangunan feminis, perlindungan para WHRD, keadilan iklim, dan respons terhadap peningkatan otoritarianisme di wilayah Asia Pasifik, termasuk Filipina dan Myanmar. Dalam struktur operasionalnya, P&M bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program dan administrasi organisasi dijalankan dengan benar (Asian Pacific Forum on Women, Law Development, 2020).

Di bawah P&M terdapat Sekretariat organisasi yang dipimpin oleh Koordinator Regional, Kirthi Jayakumar, yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan

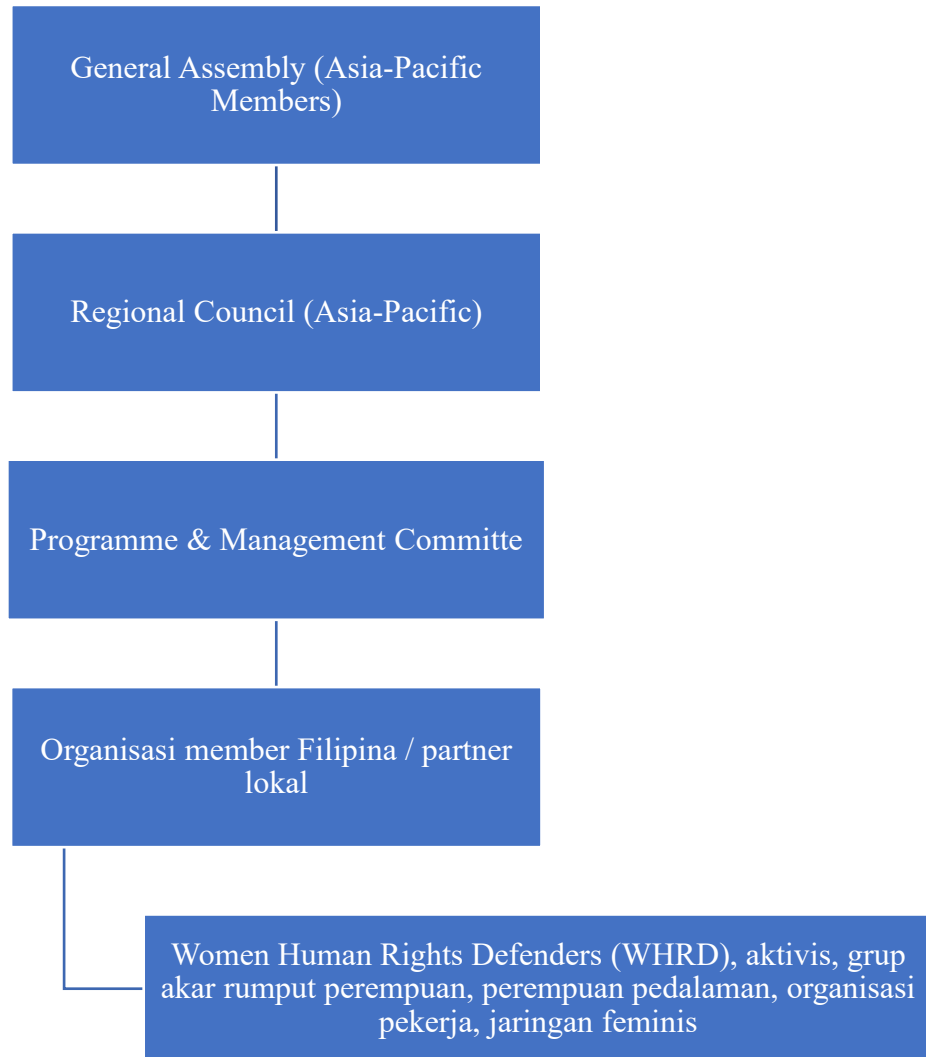
APWLD regional, yang mencakup advokasi di tingkat PBB, penguatan organisasi perempuan akar rumput, dan pengembangan gerakan feminis di Asia Pasifik. Selain itu, sejumlah staf yang penting untuk program-program penting mendukung sekretariat, seperti Nadiah Tuah untuk *Feminist Development Justice Programme*, Radhika Hettiarachchi untuk *Women Human Rights Defenders Programme*, Mia Montayre untuk bidang komunikasi dan media, dan Nadine Edson untuk program penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan (Asian Pacific Forum on Women, Law Development, 2020).

Kantor pusat APWLD masih berada di Chiang Mai, Thailand hingga tahun 2024. Kantor pusat ini terletak di 189/3 Changklan Road, Amphoe Muang, Chiang Mai 50100, Thailand. APWLD memiliki kantor satelit di Penang, Malaysia, selain kantor pusat. Kantor pusat APWLD bertanggung jawab atas koordinasi jaringan organisasi perempuan di sekitar 30 negara dan wilayah di Asia Pasifik. Ruang lingkup operasional APWLD mencakup lima wilayah utama: Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tengah, dan kawasan Pasifik (Asian Pacific Forum on Women, Law Development, 2019).

APWLD tidak memiliki "cabang nasional" resmi seperti organisasi internasional yang memiliki kantor negara di setiap wilayah. Oleh karena itu, tidak ada struktur APWLD regional tersendiri di Filipina yang berdiri secara independen. Sebaliknya, APWLD bekerja menggunakan model jaringan feminis regional dan melakukan aktivitasnya melalui organisasi anggota. Karena itu, Sekretariat APWLD bertanggung

jawab atas pelaksanaan program-program di Filipina, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Regional bersama Komite Manajemen Program (P&M) dan Dewan Regional. APWLD bekerja sama dengan berbagai organisasi perempuan Filipina sebagai mitra implementasi lapangan dalam pelaksanaan program (Asian Pacific Forum on Women, Law Development, 2020).

Berikut bagan hubungan struktur APWLD dengan jaringan-jaringan lokal di Filipina:



Gambar 1.0.2 Struktur Hubungan APWLD dengan Jaringan Lokal Filipina

Sumber: (Asian Pacific Forum on Women, Law Development, 2020)(Keck & Sikkink, 2014)
(Catatan: Diolah oleh penulis)

Beberapa organisasi anggota dan mitra APWLD di Filipina yang paling sering terlibat dalam program regionalnya adalah GABRIELA, organisasi perempuan progresif terbesar di Filipina yang berfokus pada hak perempuan, anti-kekerasan, dan

isu sosial-politik. Kemudian ada Karapatan, organisasi HAM yang aktif mendampingi korban pelanggaran HAM dan para WHRD.

Filipina adalah salah satu negara pada kawasan Asia Pasifik yang memiliki dinamika kesetaraan gender yang terus berevolusi dan berkembang mengikuti arus jaman dan perubahan dalam masyarakat, menunjukkan situasi paradoks dalam lima tahun terakhir. Di satu sisi, Filipina dianggap sebagai salah satu negara dengan capaian kesetaraan gender terbaik di Asia oleh Philippine Commission on Women (2025), dan secara konsisten menempati posisi tinggi dalam laporan *Global Gender Gap Report* yang diterbitkan oleh World Economic Forum (2023). Kebijakan seperti *Safe Spaces Act (Republic Act No. 11313)*, yang bertujuan untuk memerangi pelecehan berbasis gender baik di tempat umum maupun di internet, telah memperkuat sistem hukum nasional.

Namun, pencapaian normatif ini belum sepenuhnya mempertimbangkan situasi sosial yang dihadapi perempuan di tingkat akar rumput (*grass root*), dilatarbelakangi faktor-faktor politik dan sosial seperti budaya patriarki telah terpatril dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan oleh Philippine Statistics Authority menunjukkan bahwa sekitar 17,5% perempuan berusia 15 hingga 49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional dari orang yang mereka miliki hubungan intim. Selain itu, kebiasaan patriarkal yang kuat terus menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik, diikuti oleh faktor ekonomi yang memperkuat stereotip gender yang sudah ada. Menurut laporan Front Line Defenders (2023) dan Amnesty

Internasional (2022), aktivis perempuan di Filipina menghadapi intimidasi, pelecehan misoginis di internet, dan ancaman kriminalisasi karena melakukan advokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap perempuan terus menjadi alat untuk melemahkan gerakan perempuan.

Kelompok masyarakat sipil di Filipina sebetulnya telah memiliki gerakan-gerakan untuk mengampanyekan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu gerakan yang signifikan di Filipina adalah gerakan *#BabaeAko* yang berarti “saya adalah perempuan”, bermula dari tagar di sosial media untuk menentang sikap dan pernyataan yang dianggap misoginis oleh Presiden Rodrigo Duterte pada saat itu. Tagar ini pun berkembang menjadi sebuah gerakan yang menentang standarisasi pelecehan, kekerasan, dan perendahan terhadap perempuan dalam wacana politik. Kampanye ini berkembang menjadi mobilisasi publik, termasuk unjuk rasa pada 12 Juni 2018, hari peringatan Hari Kemerdekaan Filipina (Mongaya, 2018).

Namun dalam praktiknya hal ini belum dapat mengentaskan kekerasan berbasis gender dalam kondisi sosial di Filipina. Sebagai jaringan feminis regional di Asia-Pasifik, APWLD memainkan peran strategis dalam menghubungkan perjuangan lokal di Filipina dengan mekanisme HAM internasional. Melalui program penguatan kapasitas, penelitian feminis, dan advokasi berbasis hukum internasional, APWLD membantu organisasi perempuan di Filipina dalam menyuarakan tuntutan mereka dalam forum regional dan global, termasuk mekanisme PBB (Asian Pacific Forum on Women, Law Development, 2023). Karena penyempitan ruang sipil dan risiko yang

meningkat terhadap para WHRD, keberadaan organisasi advokasi internasional seperti APWLD sangat penting untuk memberikan solidaritas internasional, legitimasi normatif, dan tekanan politik terhadap negara untuk memenuhi HAM dan komitmen untuk kesetaraan gender.

Untuk mendukung penulis penelitian ini, penulis meninjau beberapa artikel dan literatur yang menunjukkan proses advokasi gender melalui *Transnational Advocacy Network* di Asia Tenggara. Artikel pertama adalah “*Me Too as Transnational Advocacy Networks: The Case of Anti-Sexual Violence Movement in Indonesia*” yang dituliskan oleh Karina Utami Dewi, Hangga Fathana, dan Masitoh Nur Rohma, diterbitkan pada *Journal of ASEAN Studies* Vol 11 No. 2. Studi ini menunjukkan bahwa gerakan *Me Too* bukan hanya kampanye media sosial; itu juga merupakan jaringan advokasi lintas negara yang menghubungkan aktivis, organisasi masyarakat sipil, media, dan individu untuk bekerja sama untuk memerangi kekerasan seksual. Dewi et al. (2023) menjelaskan bahwa difusi norma global tentang penolakan terhadap kekerasan seksual dan tuntutan perlindungan korban menyebabkan gerakan *Me Too* di Indonesia muncul.

Melalui kerja sama antara aktivis lokal, organisasi perempuan, dan jaringan internasional, standar global kemudian dilokalisasi ke dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Selama proses ini, TAN membantu orang lintas negara bertukar informasi dan pengalaman, memungkinkan masalah kekerasan seksual lokal menjadi masalah global. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan *Me Too* menggunakan strategi advokasi yang sejalan dengan mekanisme TAN yang diusulkan oleh Keck dan

Sikkink: *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*. Media sosial digunakan sebagai alat utama untuk menyebarkan cerita korban, mendorong solidaritas publik, dan mendorong aktor negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, gerakan *Me Too* menunjukkan bagaimana opini publik dan kekuatan simbolik di seluruh dunia dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan di seluruh negara. Penelitian Dewi et al. berfokus pada gagasan bahwa jaringan advokasi transnasional dapat memperkuat perjuangan isu gender di tingkat domestik, terutama di negara berkembang (Dewi et al., 2023). Keterkaitan studi ini dengan penelitian ini tentang TAN dalam advokasi kesetaraan gender di Asia Tenggara adalah keduanya menekankan peran jaringan lintas negara dan momentum global dalam meningkatkan visibilitas masalah perempuan dan mendorong perubahan sosial dan politik.

Artikel kedua yang akan penulis tinjau adalah “Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan di Asia Tenggara” yang ditulis oleh Monica Vira Ajeng Kristanti dalam Jurnal Hubungan Internasional Vol. 14 No. 1. Kumpulan penelitian yang kini tersedia menyoroti peran kritis yang dimainkan oleh jaringan advokasi transnasional, termasuk Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), dalam menangani masalah kompleks yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan di Asia Tenggara. Inisiatif integrasi ekonomi, ASEAN Economic Community (AEC), yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan

mobilitas pekerja, telah bertepatan dengan peningkatan migrasi di wilayah ini. Meskipun ada kemajuan ini, perempuan migran masih sering menghadapi kerentanan serius dan pelanggaran hak, seperti upah yang tidak memadai, eksploitasi, diskriminasi, penyerangan, dan perdagangan manusia, terutama di industri-industri dengan keterampilan rendah seperti manufaktur, pekerjaan rumah tangga, dan pertanian (Kristanti, 2021).

Kristanti (2021) menyimpulkan bahwa praktik pergerakan ilegal yang meluas, perlindungan hukum yang tidak memadai, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak semua berkontribusi pada kesulitan ini dengan menghambat penegakan hukum yang efisien dan sistem dukungan bagi perempuan migran. Untuk mempromosikan undang-undang dan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan migran, GAATW bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah regional, serikat pekerja, dan organisasi internasional. Jaringan ini menggunakan berbagai taktik, seperti menerbitkan materi advokasi, melakukan penelitian empiris, dan melaksanakan program bantuan langsung seperti inisiatif dukungan korban, seminar pemberdayaan, dan pelatihan. Misalnya, inisiatif GAATW seperti *Safe and Fair* berfokus pada kerentanan spesifik industri, termasuk di sektor tenaga kerja domestik atau industri pakaian, dengan tujuan mendidik perempuan migran tentang hak-hak mereka dan mendorong reformasi kebijakan.

Dengan mengembalikan kisah-kisah mereka melalui metode penelitian partisipatif, jaringan ini juga bertujuan untuk mengangkat suara perempuan migran dan

mempromosikan pemahaman feminis terhadap pengalaman nyata mereka. Namun, pengaruh GAATW masih didorong oleh advokasi, dan hambatan struktural seperti kurangnya kerja sama regional, ketidakikutsertaan lembaga-lembaga ASEAN, serta ketidakbersediaan pemerintah untuk mengadopsi standar internasional seringkali membatasi kemampuannya untuk membawa perubahan kebijakan. Meskipun publikasi dan laporan GAATW merupakan alat penting untuk meningkatkan kesadaran dan menerapkan tekanan moral, dinamika politik regional dan kesenjangan dalam keterlibatan pemangku kepentingan terkadang dapat menghambat upaya-upaya ini. Namun, untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan, jaringan-jaringan ini juga harus mendorong kemitraan yang lebih kuat dengan pemerintah nasional dan organisasi regional seperti ASEAN guna menginstitutionalisasi perlindungan dan memastikan bahwa hak-hak perempuan migran menjadi prioritas dalam tujuan pembangunan yang lebih luas.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana APWLD membangun jaringan internasional untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina tahun 2023-2025?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan suatu sumbangsih kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dan kalangan akademisi dalam bentuk penelitian ilmiah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah tertulis di atas maka tujuan penelitian ini secara khusus Adalah untuk menganalisis bagaimana APWLD membangun jaringan internasional untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina tahun 2023-2025, menggunakan kegiatan organisasional dan kampanye kesetaraan gender sebagai momentum dalam mengukuhkan kebijakan pemerintah yang sudah ada dengan penyebaran merata ke semua kalangan perempuan di Filipina melalui jaringan advokasi transnasional.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1 Teori Jaringan Advokasi Transnasional

Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, LSM internasional, jaringan feminis, akademisi, dan organisasi internasional,

membangun jejaring lintas negara untuk mendukung kebijakan, nilai, dan norma tertentu. Ini terutama berlaku untuk masalah HAM. Keck dan Sikkink mendefinisikan TAN sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari aktor-aktor yang terhubung oleh nilai, diskusi, dan pertukaran informasi yang luas dan bertujuan untuk memengaruhi kebijakan di dalam dan di luar negeri (Keck & Sikkink, 2014). Berbeda dengan aktor negara yang berdiplomasi secara formal, TAN menggunakan persuasi normatif, mobilisasi opini publik, dan tekanan internasional. Dengan demikian, kekuatan utama TAN terletak pada kemampuan mereka membingkai isu (*issue framing*), memproduksi dan menyebarkan informasi, serta menciptakan tekanan moral terhadap pemerintah.

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa terdapat empat strategi utama yang digunakan oleh TAN yang memungkinkan aktor non-negara untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan internasional (Keck & Sikkink, 2014). Keempat strategi ini menunjukkan bahwa kekuatan TAN tidak terletak pada kekuasaan koersif, tetapi pada kemampuan untuk membentuk norma, opini publik, dan tekanan moral. Berikut penjelasan dari keempat strategi TAN:

1.4.1.1 *Information Politics*

Information politics atau politik informasi adalah kemampuan jaringan advokasi untuk menghasilkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan dan kredibel kepada target yang tepat dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, informasi bukan sekadar data tetapi alat strategis untuk meningkatkan kesadaran dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Keck dan Sikkink (2014) menekankan fakta

bahwa TAN seringkali berfungsi sebagai "produsen pengetahuan alternatif" untuk mengungkap pelanggaran hak atau ketidakadilan yang tidak diakui negara. Selanjutnya, informasi didistribusikan kepada media global, organisasi global, dan publik global untuk membentuk tekanan politik.

1.4.1.2 *Symbolic Politics*

Symbolic politics atau politik simbolis mengacu pada kemampuan jaringan advokasi untuk menggunakan narasi, peristiwa, atau simbol tertentu untuk membingkai masalah sehingga memiliki dampak moral dan emosional yang kuat. Jaringan advokasi sering menggunakan kisah korban, momentum peringatan internasional, atau simbol tertentu untuk menyederhanakan masalah kompleks agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat global. Strategi ini penting karena masalah yang tidak memiliki kekuatan simbolik seringkali sulit menarik perhatian dunia.

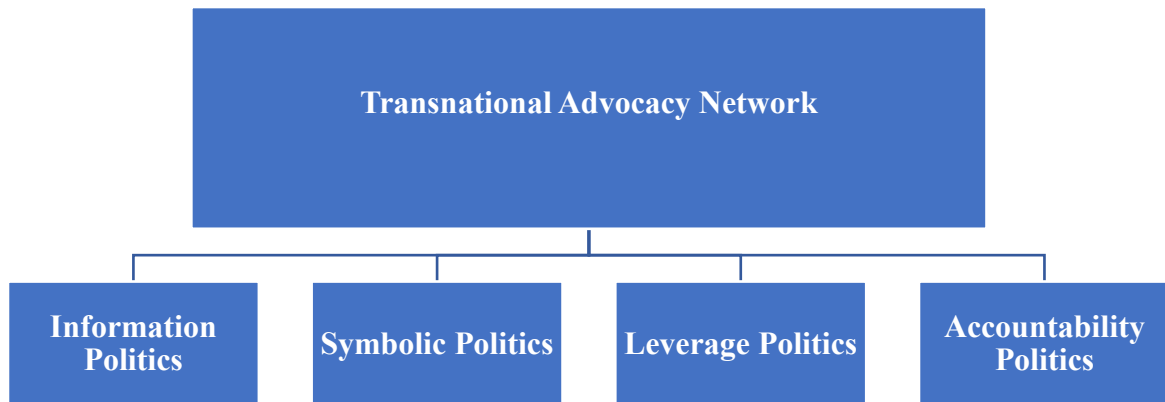
1.4.1.3 *Leverage Politics*

Menggunakan aktor dengan kekuatan material dan moral untuk menekan negara target dikenal sebagai *leverage politics* atau politik kekuatan. Keck dan Sikkink (2014) membedakan dua jenis kekuatan, yaitu kekuatan material yang terdiri dari tekanan diplomatik atau sanksi ekonomi, dan kekuatan moral terdiri dari kecaman publik dan tekanan atas reputasi internasional. Dengan strategi ini, TAN menggunakan hubungan dengan negara donor, organisasi internasional, atau lembaga multilateral untuk menciptakan tekanan eksternal pada pemerintah yang tidak berubah.

1.4.1.4 *Accountability Politics*

Accountability politics atau politik akuntabilitas berarti menuntut negara atau aktor lain untuk mematuhi komitmen normatif. Metode ini bekerja dengan cara mengingatkan dan menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik nyata dan janji resmi. Misalnya, ketika suatu negara meratifikasi konvensi HAM tetapi tidak menerapkannya, jaringan advokasi akan menggunakan komitmen tersebut sebagai alasan untuk menuntut negara tersebut bertanggung jawab.

1.5 SINTESA PEMIKIRAN



Gambar 1.3 Sinetesa Pemikiran

Sumber: (Keck & Sikkink, 2014)

Teori TAN oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dijadikan landasan dalam kerangka penelitian ini. Menurut teori ini, meski Keck dan Sikkink tidak menjelaskan secara langsung tahap implementasi dari pembangunan jaringan advokasi transnasional, keempat strategi ini cukup menjelaskan bagaimana TAN terbentuk. Strategi-strategi tersebut termasuk *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana sebuah jaringan internasional terbentuk melalui strategi-strategi ini dalam konteks aktor internasional dalam mengadvokasi isu domestik suatu negara.

Strategi pertama, yaitu *information politics*, dimana sebuah aktor akan menyusun informasi berupa laporan, riset, dan *shadow reports* dari sebuah isu gender atau tentang

perempuan yang terjadi di ranah domestik yang guna untuk mempengaruhi pendapat publik dan aktor internasional lainnya. Dijelaskan oleh Keck dan Sikkink *information politics* sebagai “Kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politis dengan cepat dan kredibel ke tempat informasi tersebut akan memberikan dampak paling besar” (Keck & Sikkink, 2014). Strategi kedua adalah *symbolic politics*, dimana sebuah kasus pelanggaran terhadap perempuan diangkat sebagai sebuah simbol ketidakadilan struktural. *Symbolic politics* menurut Keck dan Sikkink sebagai “Kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan, atau cerita yang memberikan makna pada suatu situasi atau klaim kepada audiens yang seringkali berada jauh” (Keck & Sikkink, 2014).

Leverage politics merupakan strategi ketiga, di mana aktor akan menggunakan mekanisme dari aktor organisasi internasional dan solidaritas regional untuk menekankan pemerintah negara yang memiliki isu gender tersebut. Menurut Keck dan Sikkink, *leverage politics* adalah “Kemampuan untuk meminta bantuan aktor-aktor berpengaruh untuk memengaruhi situasi di mana anggota jaringan yang lebih lemah cenderung tidak memiliki pengaruh” (Keck & Sikkink, 2014). Dan terakhir adalah *accountability politics* dimana pemerintah negara didorong untuk menjalankan kewajiban berdasarkan konvensi HAM dan kebijakan berbasis gender. Keck dan Sikkink menjelaskan *accountability politics* sebagai “upaya untuk memaksa aktor-aktor yang lebih berkuasa untuk bertindak berdasarkan kebijakan atau prinsip yang lebih samar yang secara resmi mereka dukung” (Keck & Sikkink, 2014).

1.6 ARGUMEN UTAMA

Penelitian ini menganalisis terkait upaya APWLD dalam membentuk jaringan internasional untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina pada tahun 2023-2025. Pertama penelitian mengenai latar belakang dan sejarah teori TAN dan juga APWLD sebagai organisasi regional yang berfokus pada pemberdayaan dan perlindungan wanita di Asia Pasifik, begitu pula dengan dinamika isu mengenai gender yang terjadi di Filipina. Kedua, penelitian berlanjut pada menggambarkan dan menganalisis bagaimana APWLD beserta aktor-aktor lokal membangun sebuah jaringan internasional untuk memecahkan isu ketimpangan gender yang sebelumnya sulit untuk diselesaikan hanya dengan gerakan lokal atau dalam skala nasional.

Menggunakan *information politics*, APWLD menggunakan laporan dan dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan, mulai dari *Annual Report* hingga publikasi APWLD Media Fellowship dan *Feminist Accountability Map*. APWLD menyoroti praktik *red-tagging*, intimidasi dan ancaman terhadap WHRD dan perempuan sipil di Filipina melalui dua sarana tersebut. Selanjutnya, informasi didistribusikan melalui forum internasional dan laporan resmi untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap masalah gender dan HAM di Filipina, sebelum di rangkum dalam *Annual Report* bersamaan dengan hasil program organi

Dengan *symbolic politics*, APWLD membangun solidaritas feminis di seluruh wilayah dengan memanfaatkan simbol, narasi korban, dan kampanye publik. Dengan publikasi pengalaman para aktivis perempuan yang mengalami diskriminasi untuk

menghubungkan kenyataan lokal dengan agenda advokasi internasional untuk perlindungan WHRD dan *oral statement* CSW67 oleh Joan May Salvador yang membawa isu-isu regional Filipina ke audiens dan organisasi global.

Dalam *leverage politics*, APWLD menggunakan jaringan internasional dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberi tekanan pada pemerintah Filipina. APWLD melakukan advokasi di Commission on the Status of Women (CSW) dengan status konsultatifnya dalam UN Economic and Social Council (ECOSOC) serta membangun solidaritas dengan organisasi feminis skala regional Asia Pasifik lainnya untuk memperkuat posisi gerakan perempuan Filipina.

Sementara itu, *accountability politics* dilakukan dengan menuntut Filipina untuk memenuhi komitmen internasional terkait hak perempuan dan kesetaraan gender, dimana APWLD menggunakan strategi tersebut dengan memantau pelaksanaan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui *shadow reports*, evaluasi organisasi dan hasil sensus terkait.

1.7 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis terkait upaya APWLD dalam membentuk jaringan internasional untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina pada tahun 2023-2025. Pertama penelitian mengenai latar belakang dan sejarah teori *Transnational Advocacy Network* dan juga APWLD sebagai organisasi regional yang berfokus pada pemberdayaan dan perlindungan wanita di Asia Pasifik, begitu pula dengan dinamika isu mengenai gender yang terjadi di Filipina. Kedua, penelitian berlanjut pada

menggambarkan dan menganalisis bagaimana APWLD beserta aktor-aktor lokal membangun sebuah jaringan internasional untuk memecahkan isu ketimpangan gender yang sebelumnya sulit untuk diselesaikan hanya dengan gerakan lokal atau dalam skala nasional. Sehingga dalam penelitian ini metodologi yang tepat adalah deskriptif kualitatif.

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tipe kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana jaringan advokasi transnasional yang dilakukan APWLD untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina. Menurut Denzin dan Lincoln (2017), metode ini berfungsi untuk menggali makna subjektif dari pengalaman sosial dan praktik budaya yang tidak dapat diukur secara statistik.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini hanya melihat dinamika pergerakan untuk kesetaraan gender di Filipina dalam jangka waktu dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Tujuan pembatasan periode ini adalah untuk mengamati perkembangan terbaru terkait kondisi ruang sipil, kesulitan yang dihadapi aktivis perempuan, dan tanggapan yang diberikan oleh jaringan advokasi transnasional. Kondisi ini semakin relevan dengan mandat APWLD sebagai organisasi feminis regional Asia Pasifik yang berfokus pada "keadilan pertumbuhan perempuan".

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Filipina akan cukup maju secara statistik dalam hal kesetaraan gender sebelum 2023 dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Namun, Filipina masih menghadapi masalah besar, termasuk stagnasi kesetaraan ekonomi, tingkat kekerasan yang tinggi terhadap perempuan, dan represi terhadap aktivis perempuan dan kelompok masyarakat sipil. Situasi ini menjadi momen penting bagi APWLD untuk memperluas advokasi, perlindungan perempuan pembela HAM, penelitian feminis, dan solidaritas regional di Filipina.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai dokumen, laporan, publikasi, dan sumber daring yang relevan dengan upaya APWLD untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina dari tahun 2023 hingga 2025. Pengumpulan data difokuskan pada dokumen yang memuat informasi tentang kondisi gender di Filipina, program dan jaringan APWLD, upaya advokasi, dan partisipasi APWLD dalam forum dan mekanisme internasional. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data
Dokumen resmi <i>(Annual Reports dan Press Release)</i>	Website resmi APWLD, website APWLD Media Fellowship, website Feminist Accountability Map,
Sumber lainnya	Laporan dan publikasi United Nations dan UN Women, data Philippine Statistics Authority (PSA) dan Philippine Commission on Women (PCW), jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan implementasi teori <i>Transnational Advocacy Network</i> .

Sumber: Penulis

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis tematik (*thematic analysis*) dan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, tetapi pada interpretasi makna, strategi, dan pola advokasi yang ditemukan dalam dokumen dan laporan organisasi. Virginia Braun dan Victoria Clarke (2008) menciptakan konsep analisis tematik, yang menjelaskan bahwa itu adalah metode sistematis untuk menemukan, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data

Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Philipp Mayring (2014), penelitian ini juga menggunakan analisis isi kualitatif. Penelitian ini menekankan pentingnya menafsirkan makna secara kontekstual melalui proses kategorisasi sistematis teks. Unit makna yang relevan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori konseptual berdasarkan teori TAN dan keempat strateginya. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup:

1. Reduksi Data: Memilih data yang relevan untuk tujuan penelitian (Miles & Huberman, 1994).
2. Koding dan Kategorisasi: mengelompokkan data sesuai dengan tema deduktif yang berasal dari teori TAN.
3. Interpretasi Kontekstual: mengaitkan hasil penelitian empiris dengan empat strategi teori TAN dan taktik advokasi internasional.
4. Kesimpulan: Menyusun kesimpulan tentang peran APWLD dalam membangun jaringan internasional untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab utama. Empat bab utama tersebut tersusun secara berurutan sebagai berikut:

BAB I merupakan metodologi penulisan yang tersusun atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan strategi *information politics* dan *symbolic politics* dalam pembangunan jaringan internasional APWLD.

BAB III membahas *leverage politics* dan *accountability politics* dalam pembangunan jaringan internasional APWLD.

BAB IV menyajikan penutup dan kesimpulan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian ini.